



Peningkatan Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Penanggulangan Isu Terorisme pada Era Joko Widodo (2014-2019)

Hulda Ariesta Mutiara Imbiri

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

Corresponding Author: Hulda Ariesta Mutiara Imbiri 372017037@student.uksw.edu

ABSTRACT

The counter-terrorism cooperation carried out by Australia and Indonesia is one of the efforts to combat the issue of terrorism and maintain the national security of their respective countries from terrorist threats. To make this happen, increased cooperation with other countries is needed, such as Indonesia's cooperative relations with Australia. This research aims to describe or explain the beginning of Indonesia-Australia cooperation in fighting terrorist crimes before President Joko Widodo's term of office which presented several MoUs, then experienced reforms during Joko Widodo's leadership. This research is limited to cooperation between Indonesia and Australia in the first period of Joko Widodo's administration 2014-2019. The method used is descriptive qualitative by collecting data through literature studies in the form of writings, documents and evidence related to the research object. The results of this research show that cooperation between Indonesia and Australia in overcoming the issue of terrorism is through cooperation between the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPTAK) and the Australian Financial Institution (AUSTRAC) which focuses on monitoring and freezing the flow of terrorist funds.

Keywords: Counter of Terrorism, Cooperation, Memorandum of Understanding, Center for Financial Transaction Reports and Analysis, AUSTRAC

ABSTRAK

Kerjasama kontra-terorisme yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia merupakan salah satu upaya dalam memerangi isu terorisme serta menjaga keamanan nasional negara masing - masing dari ancaman teroris. Untuk mewujudkannya, diperlukan peningkatan kerjasama dengan negara lain seperti halnya Hubungan kerjasama Indonesia dengan Australia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan awal kerjasama Indonesia-Australia dalam melawan tindak kejahatan teroris sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo yang menghadirkan beberapa MoU, kemudian mengalami pembaharuan-pembaharuan pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Penelitian ini dibatasi pada kerjasama Indonesia dan Australia pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo 2014-2019. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menghimpun data melalui studi literatur dalam bentuk tulisan-tulisan, dokumen, serta bukti terkait objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia dan Australia dalam penanggulangan isu terorisme melalui Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPTAK) dan Lembaga Keuangan Australia (AUSTRAC) yang berfokus pada pemantauan serta pembekuan aliran dana teroris.

Kata Kunci: AUSTRAC; Kerjasama; Memorandum of Understanding; Penanggulangan Teroris; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

A. PENDAHULUAN

Ilmu hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari mengenai berbagai macam isu-isu yang terjadi secara global dalam hal ekonomi, politik, keamanan dan militer. Secara fundamental hubungan internasional lahir dengan tujuan untuk mencegah kembali terjadinya perang, menghadirkan pengertian diantara negara-negara di dunia internasional dan membangun perdamaian di dunia. Isu terorisme merupakan salah satu fenomena yang memiliki pengaruh yang cukup penting dalam tatanan dunia internasional, jika dapat diulur kebelakang isu ini mendapatkan posisi strategis yang mengancam keamanan nasional negara pasca tragedi 9/11, kasus ini membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan penanggulangan kejadian -kejadian teror yang mungkin terjadi.

Menurut Ryamizard Ryacudu, selaku menteri pertahanan pada periode pertama kepemimpinan presiden Joko Widodo, melihat bahwa isu terorisme yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan ancaman nyata selain perang terhadap narkoba, Cyber dan bencana alam (T, 2019). Berikut merupakan pernyataan Joko Widodo selaku kepala Negara dalam upaya memerangi isu terorisme pasca peristiwa bom di Surabaya pada tahun 2018 yang benar – benar memperlihatkan posisi Indonesia dalam melihat terorisme (Agustina, 2018).

‘Seluruh aparat tak akan membiarkan tindakan pengecut semacam ini dan mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama – sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai – nilai agama nilai – nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai – nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai – nilai kebinekaan,‘

Sebagaimana dengan ungkapan Joko Widodo diatas tentunya dapat mencerminkan posisi Indonesia yang tidak dapat mentolerir segala bentuk gerakan yang mengancam diri dan keamanan nasional, untuk itu tentunya di era kepemimpinan Jokowi pada periode 2014-2019 ada berbagai solusi yang ditawarkan dalam memerangi terorisme, diantaranya dengan cara meningkatkan alutsista, pembuatan UU terorisme yang baru dan lain-lainnya. Diantara banyaknya solusi yang dilakukan perihal penguatan kerjasama dengan negara lain merupakan salah satu yang sudah sering dilakukan oleh Indonesia dalam memerangi terorisme sebut saja seperti hubungan Indonesia dengan Australia.

Hubungan Indonesia dan Australia terkait terorisme sudah ada sejak kejadian Bom Bali, dimana warga negara Australia merupakan salah satu negara dengan korban terbanyak yakni mencapai 88 orang. Peristiwa ini merupakan salah satu pemicu Australia melakukan kerjasama dalam penanggulangan isu terorisme dengan Indonesia semenjak itu Indonesia dan Australia kerap kali mengadakan konferensi dan perjanjian dalam memerangi terorisme. *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)* merupakan salah satu wujud keseriusan dari kedua negara untuk memerangi terorisme, badan ini digagas oleh Polri dan Kepolisian Federal Australia pada tahun 2004 dan berfokus pada penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme, dan di era Jokowi, hubungan Indonesia dan Australia sendiri semakin menunjukkan dampak positif dengan dilakukannya berbagai penandatanganan MoU kerjasama dalam bidang penanggulangan terorisme.

Kerjasama dan penandatanganan MoU dalam penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Australia sebelum era Joko Widodo mencangkup, (a) *Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in person and Related Transnational Crime (BRMC)*, (b) *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing*, (c) *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism (BRRM-CT)*, (d) *Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*, (e) *Joint Declaration of Comprehensive Partnership Between Indonesia and Australia*, (f) *Lombok Treaty*.

Adapun alasan lain yang menyebabkan perlunya peningkatan kerjasama antar kedua negara dapat dipahami dari segi geografis kedua negara, baik Australia dan Indonesia merupakan negara yang berada pada daerah Indo-Pasifik. Australia dalam *white paper* nya menyatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik merupakan salah satu ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Australia. Indonesia merupakan salah satu Negara di kawasan tersebut sehingga melalui Mekanisme Kerjasama Indonesia dan Australia diharapkan meningkatkan upaya perlindungan wilayah Indo-Pasifik dari terorisme. Salah satu kerjasama di era Jokowi adalah kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC dalam memblokir aliran dana dari kelompok teroris sebagai solusi atau upaya penanggulangan kejadian teroris dan mencegah kemungkinan kejadian serupa. Adapun kerjasama – kerjasama yang dilakukan ini pada dasarnya bertujuan untuk mencapai dampak signifikan terhadap penanggulangan terorisme dan agar meminimalisir tindak terorisme yang mengancam keamanan negara.

Kerjasama dan penandatanganan MoU dalam penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Australia pada era Joko Widodo meliputi, (a) *Joint State The Meeting of The Indonesia-Australia Ministerial Council on Law and Security*, (b) Kerjasama antara PPTAK dan AUSTRAC.

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, kerjasama yang dilakukan dengan Australia merupakan bentuk peningkatan kerjasama yang sudah terjalin sejak lama, dan berupa pembaharuan, hal ini dapat dilihat dalam kerjasama melalui konferensi antar menteri keamanan kedua negara yang menghasilkan MoU kerjasama baru yang memiliki poin sama pada dasarnya dari kerjasama yang lalu yakni memerangi terorisme. Kerjasama-kerjasama yang telah disepakati diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap penanganan isu terorisme, di era sekarang organisasi teroris seperti ISIS dan sebagainya merupakan ancaman nyata terhadap kedua negara. Adapun peningkatan ini pada dasarnya bertujuan untuk menurunkan angka terorisme yang terjadi di Indonesia maupun di Australia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Unit amatan penelitian adalah penanggulangan isu terorisme pada masa kepemimpinan Joko Widodo periode 2014-2019 dan Unit analisis penelitian adalah peningkatan kerjasama Indonesia dan Australia dalam upaya kontra-terorisme. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memngumpulkan serta menganalisis dokumen-dokumen dan data pendukung berupa buku, jurnal, serta bukti terkait penelitian. Penelitian menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan analisis menggunakan teori liberalisme.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Kerjasama Indonesia-Australia sebelum Era Joko Widodo

Kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam pemberantasan terorisme berawal dari sebuah tragedi pembajakan pesawat oleh kelompok teroris Al-Qaeda yang menabrak gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang Amerika tewas, pasca kejadian tersebut Presiden Bush selaku presiden AS saat itu mengeluarkan sebuah doktrin yaitu "*War On Terrorism*" (Indonesia, 2018). Dengan dikeluarkannya doktrin tersebut, sebagian besar negara di dunia terutama negara yang menjalin kerjasama dengan AS seperti Indonesia dan Australia langsung mengupayakan peran mereka secara aktif untuk memerangi terorisme, kurang dari setahun pasca dikeluarkan doktrin Indonesia dan Australia mengadakan pertemuan bilateral di Departemen Luar Negeri, Jakarta pada tanggal 7 Februari 2002 menyepakati Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding (MOU)*) yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Hubungan Sosial, budaya, dan Penerangan, Departemen

Luar Negeri Indonesia yaitu Abdurrachman Mattalitti dan Duta Besar Australia untuk Indonesia yaitu Richard Smith (Liputan 6, 2002).

Nota kesepahaman tersebut berisi tentang kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan *Australian Federal Police (AFP)* dalam memberantas dan mencegah terorisme dan kejahatan di lintas batas negara, kerjasama tersebut diwujudkan dengan cara saling bertukar informasi serta kedua negara bersama – sama meningkatkan keamanan dengan mengadakan latihan atau pendidikan intelijen bersama yang melibatkan pihak polisi, militer, dan badan – badan hukum yang terkait (A, 2016). *MoU* yang disepakati tersebut menjadi awal dari kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam memerangi terorisme, nota kesepahaman tersebut juga diperpanjang setiap 3 tahun dan telah diperpanjang pada tahun 2005, 2008, 2011, dan 2014 (Adeline, 2016).

Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing

Pada tanggal 12 Oktober 2002 di Paddy's dan Sri Club yang terletak di Kuta, Bali, Indonesia terjadi tragedi bom yang kemudian dikenal sebagai tragedi Bom Bali I, tragedi itu menewaskan 202 orang yang terdiri dari 164 warga negara asing dan 38 warga negara Indonesia, dari 164 WNA tersebut 88 orang adalah warga Australia (Liputan6.com, 2002). Paska Bom Bali I, Indonesia yang dihadiri oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, Dr. Hassan Wirajuda selaku Menteri Luar Negeri, Jenderal Bambang Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusi bersama pihak Australia yang dihadiri oleh Hon Alexander Downer, MP selaku Menteri Luar Negeri Australia dan Senator Chris Ellison selaku Menteri Kehakiman dan Bea Cukai mengadakan pertemuan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2002, dalam pertemuan itu kedua negara menyatakan bahwa sangat mengutuk tindakan terorisme yang terjadi pada tragedi Bom Bali I maka mereka menyepakati untuk membentuk sebuah badan yaitu *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing*. *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing* merupakan badan yang bertugas untuk menginvestigasi pelaku bom dan menyelidiki identitas korban yang mana melibatkan 45 *Australian Federal Police (AFP)* dengan Polisi Republik Indonesia (Polri), kedua negara pun menyatakan bahwa pembentukan badan tersebut merupakan salah satu realisasi terhadap komitmen untuk memerangi terorisme seperti yang ditetapkan dalam *Memorandum of Understanding* pada tanggal 7 Februari 2002 lalu (Finnegan, 2015).

Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism (BRMM-CT)

Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terorisme (BRRM-CT) adalah pertemuan yang diadakan Indonesia dan Australia pada tanggal 4-5 Februari

2004 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan Penegak Hukum dari Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, Kanada, Republik Rakyat Cina, Fiji, Perancis, India, Jerman, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Federasi Rusia, Inggris, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pertemuan ini membahas tentang pembentukan kerja sama regional yang lebih efektif dan terkoordinasi antara aparat polisi, pertahanan, keadilan dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan upaya untuk mengembangkan tukar informasi dan pembangunan kapasitas nasional yang dapat mencegah dan memerangi terorisme, pernyataan untuk saling kerja sama tersebut bercermin pada tragedi Bom Bali I, dari tragedi itu negara-negara menyadari bahwa kerja sama antar secara kooperatif sangat penting untuk menangani terorisme. Dijelaskan di dalam forum bahwa terdapat hal-hal yang direkomendasikan untuk memerangi terorisme dalam menjalankan mekanisme kerja sama yang merupakan kolaborasi antara penegak hukum dan lembaga yang terkait yaitu pertama, negara harus mengambil langkah-langkah praktis ketika melakukan koordinasi, kedua yaitu negara harus mampu mengidentifikasi cara-cara yang mendorong koordinasi dalam berbagi atau tukar informasi yang bertujuan membongkar jaringan-jaringan teroris dan mencegah serangan teroris, ketiga yaitu negara harus mampu meningkatkan kemampuan penegakan hukum yang terkait dengan upaya memerangi teroris, keempat yaitu negara harus mampu bekerjasama dalam meningkatkan penyediaan ahli teknis dan peralatan yang relevan dalam upaya mengidentifikasi pelaku terorisme dan proses pengadilannya, dan lain-lain (ASEAN, 2012).

Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)

Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) merupakan badan yang dibentuk sebagai sikap menindaklanjuti serta memprioritaskan sebagaimana yang pernah disepakati dalam pertemuan *Bali Regional Ministerial Meeting On Counter Terrorism (BRRMCT)* pada 4-5 Februari 2004 oleh Indonesia dan Australia, *JCLEC* kemudian diresmikan pada tanggal 3 Juli 2004 dengan kantor pusatnya ada di Akademi Kepolisian, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan dari dibentuknya *JCLEC*, yaitu meningkatkan kemampuan aparat keamanan dan penegak hukum dalam menangani kejahatan tradisional khususnya terorisme, upaya tersebut diterapkan dengan cara memperkuat hukum dalam memerangi terorisme dan meningkatkan atau mengembangkan kemampuan aparat yang bersangkutan demi menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara mau pun kawasan regional (Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme, 2019). Kemampuan yang dimaksud

adalah kemampuan dalam investigasi, identifikasi bahan kimia yang memiliki kemampuan meledak tinggi, identifikasi bentuk rancangan dan komponen bom serta data identitas korban. (JCLEC, 2007). Kemudian sebagai bentuk komitmen Australia dalam memerangi terorisme melalui *JCLEC*, pemerintah Australia memberikan bantuan dana sebesar \$36 juta AUD yang berlaku sampai 5 tahun guna memberikan dukungan ke kepolisian Republik Indonesia agar meningkatkan pembangunan dan operasional *JCLEC* serta membantu dalam merencanakan program pendidikan di *JCLEC* oleh *Australian Federal Police (AFP)*. (Rahel Narda Chatherine, 2022). Meskipun *JCLEC* terbentuk sebagai hasil kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia, namun tidak menutup kemungkinan jika negara – negara lain hendak memberikan bantuan berupa barang (Dana) dan jasa (trainer) yang dapat membantu tercapainya tujuan dibentuknya lembaga tersebut.

Joint Declaration of Comprehensive Partnership Between Indonesia and Australia

Pada tanggal 5 Agustus 2003 terjadi ledakan bom di Hotel JW Marriot di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Ledakan bom tersebut merupakan bom bunuh diri yang direncanakan oleh kelompok teroris yang mana telah menewaskan 12 orang dan terdapat 150 orang luka-luka. (Liputan 6, 2018). Kemudian setahun pasca kejadian itu tepatnya tanggal 11 September 2004 terjadi ledakan bom bunuh diri lagi di Kedutaan Besar Australia, tragedi tersebut menyebabkan 9 orang meninggal dan 161 orang luka-luka. (Liputan6, 2014). Adanya dua tragedi tersebut, Indonesia dan Australia mengadakan pertemuan pada tanggal 5 April 2005 yang dikenal sebagai *Joint Declaration of Comprehensive Partnership between Indonesia and Australia*. Kedua negara sangat mengutuk tragedi bom yang telah terjadi seperti pemboman Bali, pemboman Hotel JW Marriot dan pemboman Kedutaan Besar Australia, karena tragedi-tragedi tersebut keduanya berinisiatif untuk meningkatkan kerjasama dalam memerangi kejahatan tradisional maupun non-tradisional seperti *human trafficking*, kedua negara menyatakan bahwa mereka berinisiatif untuk menjalin kemitraan yang lebih dekat antara aparat keamanan dan lembaga-lembaga yang terkait, mereka juga berinisiatif untuk meningkatkan pendidikan serta kemampuan dalam berbagi informasi, sedangkan untuk merealisasikan insiatif tersebut, Indonesia dan Australia menempatkan *JCLEC* sebagai badan yang memainkan peran utama.

Lombok Treaty

Lombok Treaty atau Perjanjian Lombok merupakan perjanjian yang diresmikan pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat dan ditandatangani oleh Dr N. Hassan Wirajuda selaku Menteri

Luar Negeri Indonesia dan Alexander Downer selaku Menteri Luar Negeri Australia (KEMENLU, 2006). Selain itu, terdapat tiga prinsip yang tertera dalam perjanjian, yaitu prinsip untuk menjunjung kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah dan kesatuan, prinsip kedua yaitu prinsip untuk menjalin hubungan sebagai tetangga dengan baik tanpa ikut campur urusan dalam negeri masing-masing dan prinsip terakhir yaitu kedua negara mengakui bahwa terdapat kejahatan transnasional yang menjadi tantangan seperti terorisme dan kejahatan non-militer (Sakti, 2016).

Maka dari itu melalui 3 prinsip di atas, kedua negara menyepakati 10 bentuk kerjasama yang diuraikan menjadi 21 elemen, yaitu kerjasama intelijen, kerjasama memerangi terorisme, kerjasama pertahanan, kerjasama keamanan maritim, kerjasama keamanan penerbangan, kerjasama penegakan hukum, kerjasama antara masyarakat, kerjasama dalam organisasi internasional dalam bidang keamanan, kerjasama dalam menanggapi masalah yang darurat dan kerjasama untuk menekan proliferasi senjata pemusnah masal.

Profil Kerjasama Indonesia – Australia Di Era Joko Widodo

Kerjasama Indonesia – Australia sudah dilakukan sejak dulu dan diantara banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Kerjasama dengan Australia merupakan salah satu kerjasama yang paling lama dan solid mengingat bahwa Australia dan Indonesia berada pada kawasan yang berdekatan sehingga kedua negara memiliki prospek yang hampir sama dalam rangka menjaga keamanan wilayahnya. Salah satu hal yang menjadi konsekuensi bersama adalah perang melawan terorisme, di era sebelum Jokowi sebenarnya sudah dilakukan berbagai kerjasama dalam melawan terorisme dengan Australia, namun satu hal yang dapat membedakan penanganan di era Jokowi yakni dengan menggunakan *Soft approach*.

Kerjasama dalam penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Australia di era Jokowi mencakup (a) joint state the meeting of the Indonesia – Australia ministerial council on law and security, pada dasarnya ini merupakan forum pertemuan setingkat menteri di bidang hukum dan HAM antara Indonesia dan Australia, dimana ada berbagai hal yang dibahas dalam forum ini antara lain mencakup : Counter on Terrorism ; Foreign Terrorist Fighters ; Cyber Security ; Intelligence Sharing ; Technical Operation.

Kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2015 dan telah mengadakan 5 kali pertemuan di Jakarta dan Australia. Dalam pertemuan pertama, para pihak sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman sebagai bukti kerjasama dalam penanggulangan terorisme yang mengancam keamanan nasional negara-negara yang diwujudkan dalam kerjasama BNPT (Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme) dengan *Australia Department of Foreign Affairs and State*. Pada tahun 2018, BNPT dan Australia memperbarui Nota Kesepahaman terkait pemberantasan kasus terorisme melalui Kementerian Luar Negeri dan Dewan Pemerintah untuk menciptakan dampak yang lebih besar melalui kerja sama. Adapun beberapa ruang lingkup MoU tersebut antara lain; Melaksanakan Konsultasi Bilateral secara reguler di bidang penanggulangan terorisme; Berbagi informasi intelijen; Meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum kedua negara; Memperkuat peningkatan kapasitas dan kemampuan melalui jaringan dan program pelatihan serta pendidikan; Pertukaran kunjungan antar pejabat tinggi dan para analis; Seminar, Konferensi, dan operasi bersama jika dimungkinkan (BNPT, 2018). (b) Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) dan Lembaga Intelijen Keuangan Australia (AUSTRAC); kerjasama ini pada dasarnya telah digagas sebelum era Joko Widodo dan mulai efektif sejak kepemimpinan beliau, hal ini dapat dilihat dari pendatanganan MoU antara PPTAK dengan AUSTRAC dalam hal pembekuan dana – dana (*funding*) pada tahun 2017 sebagaimana dilansir dalam laman (Tempo, 2017). Kerja sama ini berfokus pada pemantauan aliran dana teroris. Ini menjadi fokus karena kelompok teroris tidak dapat berfungsi tanpa aliran uang untuk mendukung mereka dalam melakukan aksi teroris dan kegiatan ini tidak dapat dilakukan begitu saja. Selain itu, kerjasama antara PPTAK dan AUSTRAC juga melahirkan forum Terrorist Financing Summit yang diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mencegah aliran dana teroris di negara-negara Asia Tenggara dan Australia.

Pada dasarnya kerja sama para pihak didasarkan pada fakta bahwa melacak aliran uang teroris tidak semudah yang dibayangkan, karena kerja sama dengan berbagai mitra intelijen negara tentu akan berdampak positif terhadap aksi terorisme yang mungkin bisa terjadi. Kerjasama kontra terorisme antara Indonesia dan Australia di era Jokowi sebenarnya merupakan pembaruan dari kerja sama sebelumnya, namun tidak bisa dipungkiri kerja sama tersebut berdasarkan kesepakatan yang sudah ada sebelumnya, seperti *Lombok Treaty*.

Analisis Peningkatan Kerjasama Indonesia – Australia Berdasarkan Konsep dan Teori

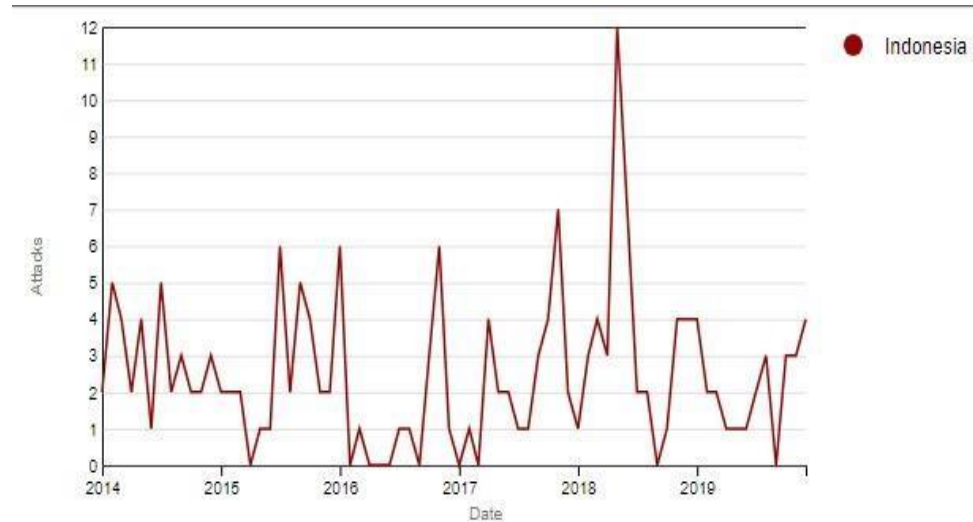
Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah menciptakan kelompok teroris dengan dimensi baru jaringan internasional sehingga mengharuskan kerjasama antar pemerintah dalam skala global untuk mengimbangi aksi teroris internasional. Dengan maraknya kasus teroris yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) giat melakukan pencegahan-pencegahan

agar meminimalisir terjadinya kejahatan teroris yang akan mengancam keamanan negara.

Liberalisme percaya bahwa negara demokrasi yang cenderung melakukan kerjasama dan damai terlihat dalam Indonesia dan Australia sebagai negara demokrasi mendorong perdamaian dan menghindari terjadinya konflik. Kerjasama yang dilakukan tidak terlepas dari asumsi dasar teori liberalisme. Kaum liberalis berasumsi bahwa sifat dasar manusia memiliki hal positif dimana dari asumsi dasar tersebut melihat bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif (bekerjasama) daripada konfliktual. Selain itu liberalisme juga percaya pada kemajuan. Dalam hal ini modernisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama ini dilakukan agar mencapai sebuah kemajuan yang dapat diartikan sebagai proses pergeseran perubahan kehidupan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jika dilihat dari pandangan liberalisme, maka ini sejalan dengan teori tersebut dimana diharapkan bahwa dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia mengalami kemajuan/peningkatan daripada kerjasama-kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya, sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir tindak kejahatan terorisme yang dapat mengancam keamanan negara mereka masing-masing.

Wujud dari kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Australia di Era Jokowi dalam mengatasi kasus terorisme membuahkan beberapa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan terorisme di Indonesia yang mana sesuai dengan teori yang ada pada liberalisme. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dampak positif yang terjadi di Indonesia setelah berlangsungnya kerjasama tersebut. Beberapa diantaranya yaitu; pertama, pada tahun 2015 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) milik Indonesia bersama – sama dengan Lembaga Intelijen keuangan Australia yang bernama *Australian Transaction Report and Analysis Center (AUSTRAC)* berhasil melacak aliran dana teroris dan melakukan pembekuan dana teroris sebesar Rp 2,83 miliar sehingga terhambatnya pergerakan aksi terorisme (Liputan6, 2015); kedua, yaitu pada tahun 2017, Indonesia dalam Indeks Global Terorisme menempati peringkat ke-42 dari 138 negara yang rentan akan aksi terorisme. Data tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni berada pada peringkat 38 sebagai negara yang rentan akan aksi terorisme (Index, 2018); terakhir, yaitu melalui *sharing* informasi mengenai pemetaan pergerakan terorisme yang dilakukan oleh Lembaga Intelijen kedua negara, Indonesia pada tahun 2018 berhasil melakukan penangkapan terhadap 396 tersangka teroris sebelum melakukan aksinya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni hanya dapat menangkap 176 tersangka teroris.

Figure 1. Data Statistik Indeks Global Terorisme.



Sumber : www.start.umd.edu/gtd

Meskipun adanya dampak-dampak positif tersebut, namun kerjasama antara Indonesia dan Australia tak membungkam kenyataan bahwa pergerakan aksi terorisme di Indonesia terus berjalan dan bahkan mengalami peningkatan. Menurut Kapolri Jenderal, Tito Karnavian, aksi terorisme di Indonesia pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 42% dari tahun sebelumnya, dimana sepanjang tahun 2018 terdapat 17 kasus terorisme sedangkan di tahun 2017 hanya terdapat 12 kasus terorisme. Selain itu, meningkatnya angka kematian akibat terorisme di Indonesia juga menjadi salah satu pengukur bahwa kerjasama Indonesia dan Australia dalam mengatasi kasus terorisme tidak membuahkan hasil yang nyata. Menurut *Global Terrorism Database*, korban tewas akibat aksi terorisme di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 7 orang, namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 28 orang. (Times, 2021). Oleh sebab itu berdasarkan data – data yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga dapat dilihat bahwa kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Australia di masa kepemimpinan Jokowi yang pertama belum membuahkan hasil yang begitu signifikan. Hal ini dilihat dari sisi negara Indonesia yang masih mengalami rentetan serangan aksi terorisme yang bahkan kian tahun kian bertambah banyak jumlahnya dibandingkan dengan kasus terorisme di Australia. Meskipun telah berhasil membongkar peta pergerakan aksi terorisme dan bahkan telah berhasil membekukan aliran Dana terorisme. Namun, kerjasama yang terjalin tidak dapat dikatakan berhasil sepenuhnya karena adanya fakta bahwa kasus

terorisme di Indonesia pada kenyataannya semakin bertambah. Kerjasama yang terjalin antar kedua negara dalam hal ini tidak dapat dinilai menguntungkan bagi negara Indonesia karena kerjasama yang terjalin tidak berhasil menurunkan angka kejahatan terorisme secara nyata. Selain itu juga faktor menguntungkan atau tidaknya, dalam kerjasama ini tidak dapat dilihat secara jelas karena pada akhirnya aksi tindakan terorisme akan diselesaikan secara internal, yaitu melalui aparat kepolisian negara masing-masing, melihat dari kasus-kasus yang terjadi merupakan kasus internal masing-masing negara. Dengan demikian, penulis melihat kerjasama antar kedua negara tidak membuahkan hasil secara signifikan.

D. SIMPULAN

Pada dasarnya mekanisme penyelesaian masalah teroris yang terjadi di Indonesia, dengan adanya kerjasama dengan negara lain tersebut menandakan pentingnya isu ini untuk diperangi oleh semua negara. Adapun mekanisme kerjasama tersebut dapat dilihat dalam bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia pada era kepemimpinan Joko Widodo bukanlah kerjasama yang baru pertama kali dilakukan melainkan kerjasama tersebut sudah ada pasca bom Bali II dan sejak saat itu kerjasama antara Indonesia dan Australia semakin diperkuat melalui berbagai penandatanganan MoU hingga konferensi-konferensi lainnya. Berdasarkan data terorisme yang terjadi di Indonesia maupun Australia dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama Indonesia dan Australia tentang terorisme belum terlihat adanya peningkatan hasil. Karena terbukti di masa pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) masih banyak kasus terorisme yang terjadi. Karena terorisme merupakan isu yang sensitif maka penulis tidak terlalu mendapatkan banyak data yang dipublikasikan dari pemerintah. Baik pemerintah Indonesia maupun Australia, menangani kasus terorisme secara domestik. Yaitu tidak ada bantuan yang secara langsung diberikan dari pemerintah Australia untuk menangani kasus terorisme di Indonesia, begitupun sebaliknya. Dilihat dari aktor dibalik kejadian terorisme yang terjadi di Indonesia maupun Australia, ISIS merupakan aktor yang terus menerus ada dibelakang aksi terorisme di kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

ABC Australia. (2018). Terdakwa Teroris Tertawa saat divonis 38 Tahun Penjara, <https://news.detik.com/abc-australia/d-4314314/terdakwa-teroris-tertawa-saat-divonis38-tahun-penjara> diakses pada 18 Juni 2022. 13:16 WIB.

- Adeline, Hellen. 2016. Kerjasama Kemanan Indonesia dan Australia Dalam Menanggulangi Violent Extremism of Foreign Terrorist Fighter (EFTF). *eJournal Hubungan Internasional*, volume 4 (4), 1133-1146
- Agustina, W. (2018, Juni 22). "Jokowi Kutuk Aksi Bom di Surabaya, Berikut pidato Lengkapnya".
- Agustina, Widiarsi. (2018). "Jokowi Kutuk Aksi Bom di Surabaya, Berikut Pidato Lengkapnya" dalam *tempo.co* <https://nasional.tempo.co/read/1088515/jokowikutuk-aksi-bom-di-surabaya-berikut-pidato-lengkapya> diakses pada 22 Juni 2022, 20:16 WIB.
- Ambarwoto, Imam. (2017). *Teror di Mapolres Banyumas*. Dalam laman <https://m.cnnindonesia.com/tv/20170411133111-404-206612/teror-di-mapolresbanyumas/> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 19:27 WIB
- Ansari, R. (2016). Kerjasama Bilateral Indonesia dan Australia Dalam Penanganan Terorisme di Indonesia tahun 2002-2013. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2 (1), 88-98., <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- ASEAN. 2012. Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorisme Bali, Indonesia, 5 February 2004 Co Chairs Statement. Diakses 20 Juni 2022 pada https://asean.org/?static_post=bali-regional-ministerial-meeting-on-counter-terrorismbali-indonesia-5-february-2004-co-chairs-statement
- Australia Embassy Indonesia. (2015). "Joint Statement The Meeting of the Indonesia-Australia Ministerial Council on Law and Security" dalam laman *indonesia.embassy.gov.au* https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/JS15_001.html diakses pada 21 Juni 2022, 16:03 WIB.
- Australia Embassy Indonesia. (2015, Juni 21). "Joint Statement The Meeting of the IndonesiaAustralia Ministerial Council on Law and Security". *Indonesia Embanssy.gov.au*, p. https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/JS15_001.html.
- Bank Indonesia. 2013. *Joint Declaration of Comprehensive Partnership Between the Republic of Indonesia and Australia*. Diakses 19 Juni 2022 pada <https://www.bi.go.id/en/iru/highlight.news/Pages/Joint%20declaration%20Indonesia%20Australia.aspx>
- BBC Indonesia. (2015). Australia menangkap lim terduga teroris. Dalam https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150418_australia_tahan_teroris diakses pada 18 Juni 2022. 12:40 WIB.
- BBC Indonesia. (2016). *Serangan Bom dan Pisau Digalkan Jemaat*. Dalam laman https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160828_indones

- [ia medan serangan gereja](#) diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 17:36 WIB
- BBC Indonesia. (2017). *Ledakan di Kampung Melayu Jakarta Diduga Bom Bunuh Diri*. Dalam laman <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-40035376> diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 18:18 WIB
- BBC Indonesia. (2017). Pelaku 'serangan teror' Melbourne ditembak mati. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40168651> diakses pada 18 Juni 2022. 15:10 WIB
- BBC Indonesia. (2017). *Pembakaran Polres Dharmasraya, Sumatera Barat, disebut 'serangan teroris'*. Dalam laman <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-41959976> diakses pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 19:39 WIB
- BNPT. (2018). "BNPT Perbarui Kerja Sama Dengan Pemerintah Australia Dalam Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan" dalam laman [bnpt.go.id https://www.bnpt.go.id/bnpt-perbarui-kerja-sama-dengan-pemerintahaustralia-dalam-penanggulangan-terorisme-dan-ekstremisme-berbasis-kekerasan.html](https://www.bnpt.go.id/bnpt-perbarui-kerja-sama-dengan-pemerintahaustralia-dalam-penanggulangan-terorisme-dan-ekstremisme-berbasis-kekerasan.html) diakses pada 20 Juni 2022, 13:25 WIB.
- BNPT. (2018, Juni 10). BNPT Perbaharui Kerja Sama Dengan Pemerintah Australia Dalam Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. *bnpt.go.id*, pp. <https://www.bnpt.go.id/bnpt-perbarui-kerja-sama-dengan-pemerintah-australia-dalampenanggulangan-terorisme-dan-ekstremisme-berbasis-kekerasan.html>.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- CNN Indonesia. (2016). *Kapolri ungkap jati diri pelaku bom bunuh diri Solo*.BBC dalam laman <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20161113112153-20-172279/gereja-oikumenesamarinda-dilempar-bom-diduga-molotov> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 15:33 WIB
- CNN Indonesia. (2018). *Rekapitulasi Fakta Rentetan Bom Surabaya dan Sidoarjo*. Dalam laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180514084714-20-297934/rekapitulasi-fakta-rentetan-bom-surabaya-dan-sidoarjo> diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 21:00 WIB
- CNN Indonesia. (2019). *Kronologi Bom Bunuh Diri Kartasura*. Dalam laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190604061309-20-400812/kronologi-bombunuh-diri-di-pos-polisi-kartasura> diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 22:15 WIB

- Demokratisasi. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 143-153. Diperoleh dari <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/.../672>
- Detik. (2014). Kronologi Penyanderaan Maut 17 jam di Sydney. Dalam <https://news.detik.com/internasional/2778570/kronologi-penyanderaan-maut-17-jam-disydney/4> diakses pada maret 2022, 12:14 WIB
- detik.com, pp. <https://news.detik.com/berita/d-4446464/menhan-teroris-narkoba-bencanaancam-nyata-bangsa> .
- Dugis, Vinsensio. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*.
- Faizal, Achmad. (2018). *Lagi, Satu Keluarga Diduga Terkait Ledakan Bom Sidoarjo*. Dalam laman <https://regional.kompas.com/read/2018/05/14/01232301/lagi-satu-keluargadiduga-terkait-ledakan-bom-sidoarjo> diakses pada tanggal 13 juni 2022, pukul 21:13 WIB
- Hendropriyono. (2009). *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*. Buku Kompas: Jakarta.
- Heryadi. (2017). "Australia dan Indonesia Kerja Sama Memutus Keuangan Teroris" dalam laman [mediaindonesia.com https://mediaindonesia.com/read/detail/90342-australia-danindonesia-kerja-sama-memutus-keuangan-teroris#](https://mediaindonesia.com/read/detail/90342-australia-danindonesia-kerja-sama-memutus-keuangan-teroris#) diakses pada 21 Okt 2022, 18:22 WIB.
- Heryadi. (2017, April 16). Australia dan Indonesia Kerja Sama Memutuskan Keuangan Teroris. *media indonesia.com*, pp. <https://mediaindonesia.com/read/detail/90342-australia-dan-indonesiakerja-sama-memutus-keuangan-teroris#>.
- JCLEC. (2007). JCLEC dan Tuntutan Profesionalisme Polisi. Diakses 19 Okt 2022 pada http://www.jclec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=2
- Kementerian Hukum dan Ham . (2018, Juli 12). "Lawan Terorisme, Indonesia-Australia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Hukum dan Keamanan. *kemenkumham.go.id*, pp. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/lawan-terorisme-indonesia-australia-tingkatkankerja-sama-bidang-hukum-dan-keamanan>.
- Kementerian Hukum dan Ham. (2018). "Lawan Terorisme, Indonesia-Australia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Hukum dan Keamanan" dalam laman [kemenkumham.go.id https://www.kemenkumham.go.id/berita/lawan-terorisme-indonesia-australiatingkatkan-kerja-sama-bidang-hukum-dan-keamanan](https://www.kemenkumham.go.id/berita/lawan-terorisme-indonesia-australiatingkatkan-kerja-sama-bidang-hukum-dan-keamanan) diakses pada 21 Okt 2022; 15:33 WIB.

- Kementrian Luar Negeri. 2006. Agreement Between Australia and Republic of Indonesia on the Framework of Security Cooperation (the Lombok Treaty). Diakses 19 Okt 2022 pada www.treaty.kemlu.go.id
- Kompas.com. (2017). *Kronologi Penyerangan Markas Polda Sumut Oleh 2 Terduga Teroris*. Dalam laman <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2017/06/25/09512551/kronologi.penyerangan.markas.polda.sumut.oleh.2.terduga.teroris> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 19:20 WIB
- Liputan6.com. (2014). Ledakan Mobil Depan Kedubes Australia di Jakarta. Diakses 19 okt 2022 pada <https://m.liputan6.com/global/read/2102467/9-9-2004-ledakan-bom-mobildepan-kedubes-australia-di-jakarta>
- Liputan6.com. (2018). Ledakan Bom Mobil Mengguncang Hotel JW Marriott Jakarta <https://m.liputan6.com/global/read/3609762/5-8-2003-ledakan-bom-mobilmengguncang-hotel-jw-marriott-jakarta>
- Liputan6.com. 2002. Bom Bali I Renggut 202 Nyawa. Diakses 19 Okt 2022 pada <http://news.liputan6.com/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-renggut-202-nyawa>
- Liputan6.com. 2002. Indonesia-Australia Sepakat Memerangi Terorisme. Diakses 19 Okt 2022 pada <http://news.liputan6.com/read/28705/indonesia-australia-sepakatmemerangiterorisme?page=2>
- Maharani, T. (2019, february 21). Menhan: Teroris-Narkoba-Bencana Ancaman Nyata Bangsa.
- Maharani, Tsarina. (2019). Menhan: Teroris-Narkoba-Bencana Ancaman Nyata Bangsa” dalam laman detik.com <https://news.detik.com/berita/d-4446464/menhan-teroris-narkobabencana-ancaman-nyata-bangsa> diakses pada 14 Juni 2022, 00:15 WIB.
- Mukhtar, S. (2016). Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era
- National Geographic Indonesia. (2018). Kronologis Serangan 9/11, Runtuhnya Menara Kembar, dan Osama Bin Laden. Diakses pada 1 Desember 2022 pukul 12.44 WIB melalui : <http://nationalgeographic.grid.id/read/13935227/kronologis-serangan-911-runtuhnyamenara-kembar-dan-osama-bin-laden?page=all>
- National Geographic Indonesia. (2018, July 27). Kronologis Serangan 9/11, Runtuhnya Menara Kembar, dan Osama Bin Laden. pp. <http://nationalgeographic.grid.id/read/13935227/kronologis-serangan-911-runtuhnyamenara-kembar-dan-osama-bin-laden?page=all>.
- Purbolaksono, Arfianto. (2016). Bom Tamrin dan Radikalisme di Indonesia. The Indonesian Institute Center For Public Policy

- Research dalam laman
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2016/02/Update-Indonesia-Volume-X-No.-2-Januari-2016.pdf&ved=2ahUKEwj1wcjrwPLiAhVGPK0KHAdEDdoQFjACegQIBB-AB&usg=AOvVaw1dPtT-c8eZ5wD-OKMAx4cL> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 14:53 WIB
- Qodir, Abdul. (2016). Ini Kronologi Teror Bom Jakarta dari Detik ke Detik. Kompas.com dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/01/17/05300041/Ini.Kronologi.Teror.Bom.Jakarta.dari.Detik.ke.Detik> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 15:10 WIB
- Qodir, Zuly. (2014). *Radikalisme Agama Di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rahmat, Pupu Saeful. (2009). "Penelitian Kualitatif". *EQUILIBRIUM*, 5(9), 1-8.
- Rimadi, Luqman. (2018). Detik-detik Mencekam aksi teroris di Australia yang disaksikan Menteri Yasonna. Dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3688646/detik-detikmencekam-aksi-teroris-di-australia-yang-disaksikan-menteri-yasonna> diakses pada 18 Juni 2022. 15:41 WIB
- Sakti, Taruna Rastra. 2016. Kerjasama Keamanan: Studi Kasus Traktat Lombok antara Indonesia dan Australia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9, 99-114
- Sari, Amanda Puspita. (2014). Penyanderaan di Sydney Berakhir. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141215231855-113-18337/penyanderaan-di-sydney-berakhir> diakses pada 18 Juni 2022. 12:05 WIB
- Simanjuntak, Shara Y. (2016). Analisis Kerja Sama Bilateral Indonesia Dengan Australia Dalam Penanggulangan Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002-2015). *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro*. Vol.2 No.3. diperoleh dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/12262/11912>
- Sofwan, Rinaldy. (2017). *Polisi Tetapkan Lima Tersangka Bom Samarinda*. CNN dalam laman <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20161117142706-12-173291/polisi-tetapkan-limatersangka-bom-samarinda> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 17:02 WIB
- Sohuturon, Martahan. (2018). *Mako Brimob Rusuh, Napi Berusaha Rebut Senjata*. Dalam laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180508230552-20-296744/makobrimob-rusuh-napi-berusaha-rebut-senjata> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 22:03 WIB

- Suastha, Riva Dessthania. (2016). Remaja Pelaku Teror Australia Dipenjara Tujuh Tahun. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161207175555-113-178054/remajapelaku-teror-australia-dipenjara-tujuh-tahun> diakses pada 18 Juni 2022, 12:55 WIB.
Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
- tempo.co*, pp. <https://nasional.tempo.co/read/1088515/jokowi-kutuk-aksi-bom-di-surabayaberikut-pidato-lengkapnya>.
- W. Arkhealus. (2017). "PPATK, Austrac Sign MoU to Cut Off Terrorism Funding" dalam laman *tempo.co* <https://en.tempo.co/read/842207/ppatk-austrac-sign-mou-to-cut-offterrorism-funding> diakses pada 21 Juni 2022, 16:43 WIB.
- Wahid, Abdul. (2004). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Retika Aditama.
- Wardlaw, Grant. (1986). *Political Terrorism*. New York: Cambridge University Press.
- Windiyani, Reni (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135-152. Diperoleh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/download/16912/13722>